

**PERWALIAN WANITA DALAM PERKAWINAN
MENURUT MAZHAB HANAFI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**



OLEH:

ZULKHOIRI EFENDI
10621003704

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Dalam pernikahan wali merupakan hal yang urgen, wali menurut mayoritas Mazhab merupakan rukun sahnya pernikahan. Namun berbeda dengan Mazhab Hanafi yang menganggap sah pernikahan tanpa wali. Pandangan Hanafipun didukung dengan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadits. Untuk mengetahui pandangan ini, penyusun tertarik untuk meneliti "PERWALIAN WANITA DALAM PERKAWINAN MENURUT MAZHAB HANAFI".

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan wanita sebagai wali menurut Abu Hanifah, dan untuk mengetahui landasan pemikiran Abu Hanifah dalam hal perwalian, serta untuk mengetahui tinjauan pemikiran Abu Hanifah menurut hukum Islam.

Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa sebagian ulama' berpendapat wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun sahnya pernikahan. Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali merupakan syarat kelengkapan perkawinan.

Sementara dalam fiqh, terdapat perbedaan yaitu bahwa ulama Hanafiah membolehkan perempuan menikah tanpa persetujuan walinya. Dan perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri, karena perempuan yang sudah akil baligh dianggap memiliki kecakapan hukum yang sempurna, dalam hal ini Abu Hanifah menggunakan dalil surat Al-Baqarah Ayat 240 dengan mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli, sesungguhnya wanita itu mempunyai kemandirian untuk melakukannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan wali, wanita tidak saja dijadikan objek hukum sebagaimana kebanyakan ulama dalam memahami ayat-ayat tentang wanita pada umumnya mendiskriminasikan wanita, namun padahal lebih dari itu wanitapun bisa menjadi subjek hukum dalam segala bidang dengan memandang situasi dan kondisi dengan tidak mengabaikan norma-norma agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

A. Kelahiran Imam Abu Hanifah.....	13
B. Pendidikan Imam Abu Hanifah	14
C. Kitab-Kitab Karangan Imam Abu Hanifah.....	20
D. Guru-Guru Dan Murid-Murid Imam Abu Hanifah.....	26

BAB III KONSEP WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Wali.....	27
B. Dasar Hukum Perwalian Dalam Pernikahan	29
C. Urutan Wali Dalam Pernikahan	37
D. Pendapat Ulama Tentang Wali Dalam Pernikahan.....	38

**BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG
PERWALIAN WANITA DALAM PERKAWINAN**

A. Kedudukan Wanita Sebagai Wali Menurut Mazhab Hanafi	51
B. Dalil Pemikiran Mazhab Hanafi Dalam Perwalian.....	59
C. Tinjauan Pemikiran Mazhab Hanafi Menurut Hukum Islam	63
D. Analisa	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan¹.

Perkawinan memiliki kedudukan yang suci di dalam masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat Arab Islam. Sebagaimana diketahui di dalam Islam, bahwa pernikahan adalah separoh agama (*nishfuddin*)².

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh³. Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan”, berasal dari kata nikah () yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*)⁴.

Sedangkan menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

شَرَاءٌ هُوَ وَضْعُهُ الْإِنْفِئِدُ اسْتِئْتِ الرَّ بِالْمَرْأِ وَ اسْتِئْتِ الْمَرْأَ بِالرَّ .

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta; Pena Pundi Aksara, t.th), h. 477

² Makmun Mubayyidh, *Saling Memahami Dalam Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 409

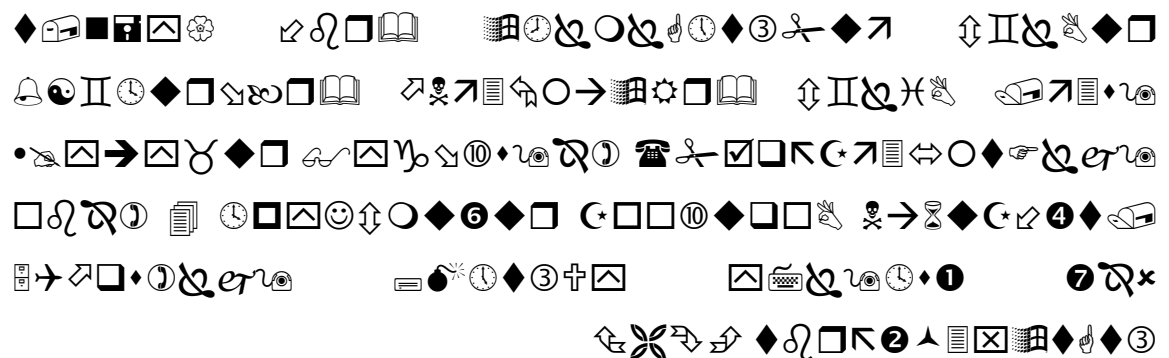
³ Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1994), Cet Ke-3, edisi kedua, h. 456

⁴ Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung; Dahlan, t.th.), Jilid 3, h. 109

Artinya: “Pernikahan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”⁵.

Syaikh Hasan Ayyub mendefenisikan, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal⁶.

Adapun tujuan disyaria’kan perkawinan atas umat Islam diantaranya adalah untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang⁷, hal ini terlihat dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁸.

Diantara hikmah dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara’ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Adapun fiqh yang mengatur hal ihkwal perkawinan ini disebut fiqh munakahat. Munakahat itu termasuk dalam lingkup muamalat dalam artian umum, yang mengatur hubungan antar sesama manusia.

⁵ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana, 2003), edisi pertama, cet. Ke-2, h. 8

⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga*, (Jakarta; Dar at-Tauji wa An-Nashr Al-Islamiyyah, 2001), h.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor; Kencana, 2003), h. 80-81

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Solo; PT. Qomari Prima Publisher, 2007), h.

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti : menurut *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.

☞ ☐ ✨ 🕒 ⬛ 🔍 📷 ⚙️ ⌚ ↶ ⇄ ⤵ ☒ ★ 🏠 ♀ ☹ ➡ 📄 II & 👁 ♦ ☐

♦ ♀ ☐ ⋈ ② 🧑 🗑 ① + ✂ ✎ 📖 ↶ 📄 + 🗑 ☒ ➡ • 🌀 🏠 × ✎ ✓ ☒ II ✎ ☐ ☒ ∞

Dari begitu banyaknya suruhan Allah SWT dan Nabi SAW untuk melaksanakan perkawinan itu maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah SWT dan Nabi SAW untuk dilakukan.

⁹ *Ibid.*, h. 756

terdapat kesepakatan bahwa perkawinan di pandang sah menurut agama apabila disertai seorang wali. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

أبو كريب

حجاج عن الزهري عن عروة

عليه :
10 .

عليه :

Artinya: “Kami dikhabarkan oleh Abu Khuraib, kami di khabarkan kan oleh Abdullah bin Mubarak yang di ambil dari Hajjat, di ambil dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah dan diambil dari Nabi SAW dan di ambil dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata Keduanya: Rasulullah bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali”. (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadist lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حدثنا جميل

العقيلي

سيرين

عليه :

هريرة :

هشام

نفسها. الزانية هي

نفسه.¹¹

Artinya: “Kami menceritakan kepada Jamil Hasan Al-Atkiya, dan kami menceritakan kepada Muhammad bin Marwan Al-Uqaili, lalu kami menceritakan kepada Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Syirin dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri sebab hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri” (HR. Ibnu Majah).

Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah wanita boleh menjadi wali dan boleh menikahkan dirinya sendiri:

هنا دليل

ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فخاصموها

نفسها

يزوجها فزوجها

غيره

عنه

12 .

Artinya: “Sesungguhnya perempuan yang menikahkan anaknya dengan keridhaannya, maka datanglah walinya si anak tersebut dan membawa urusan tersebut

¹⁰ Abi Abdillah Ibn Yazid Al-Kazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Darul Fiqri, t.th.), Jilid 3, h. 590

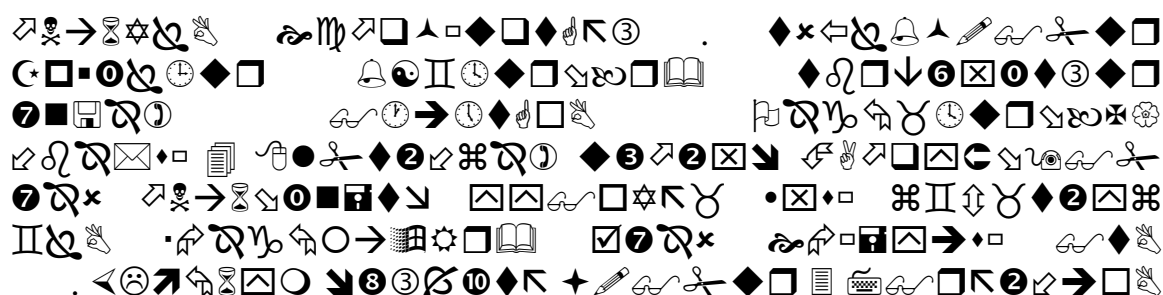
¹¹ *Ibid*, h. 591

¹² Syam ad-Din as-Sarakshi, *Al Mabsuth*, (Bairut; Daar al-Ma’rifah, 1989), Jilid V, h. 10

kepada Ali r.a maka Ali membolehkan pernikahan tersebut, dengan dalil ini menjadi patokan bahwa perempuan apabila menikahkan dirinya atau memerintahkan orang lain (yang bukan walinya), untuk menikahkan dirinya maka niscaya nikahnya sah”.

Dalam hal ini Abu Hanifah menggunakan dalil dengan mengqiaskan akad nikah dengan akad jual beli, sesungguhnya wanita itu mempunyai kemandirian dalam melakukannya. Dan juga Abu Hanifah mengatakan bahwa *dzawil arham* (keturunan dari garis perempuan/ibu) termasuk wali¹³.

Tentang dibolehkan kewalihan ini Abu Hanifah mengambil dalil dari Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 240 :



Artinya : “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (al-Baqarah: 240)¹⁴.

Menurut Abu Hanifah ayat diatas memberikan sebuah kedudukan bahwa seorang wanita boleh berbuat sesuatu terhadap dirinya sendiri untuk kebaikan dalam arti kata ia boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa izin wali apabila dia menikah dengan laki-laki yang sekufu dengannya¹⁵.

¹³Syaikh Hasan Ayyub, *op. cit*, h 82

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 49

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Bairut; Dar al-Fikr, t.th), Jilid VII, h. 187

Adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam hal perwalian, terlihat dalam kitab fiqh-fiqh klasik, dengan alasan yang berbeda, tidak demikian halnya dengan Mazhab Hanafiyyah, ia membolehkan wanita menikah tanpa wali. Dengan perbedaan diatas, merupakan fenomena yang perlu dikaji secara mendalam, salah satu yang cukup menarik bagi penulis adalah masalah perwalian, yang mana hanya Abu Hanifah sendiri yang mengatur tentang kebolehan perwalian wanita. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk meneliti dalam perspektif fiqh dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PERWALIAN WANITA DALAM PERKAWINAN MENURUT MAZHAB HANAFI”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, tampak bahwa kedudukan wanita dalam keluarga perlu untuk dikaji ulang secara mendalam, untuk memberikan penjelasan kepada umat Islam umumnya, wanita muslimah pada khususnya, yang mana usaha tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat karena minimnya pengetahuan tentang hal itu, untuk itu perlu diadakan suatu penelitian tentang status wanita dalam perkawinan menurut kitab-kitab fiqh.

Disebabkan banyaknya pembahasan dalam masalah keluarga, maka untuk itu studi ini penulis batasi dalam masalah peran wali dalam perkawinan, perwalian wanita dalam perkawinan dan status hukum perwalian wanita dalam pemikiran Abu Hanifah.

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan wanita sebagai wali menurut Mazhab Hanafi?
2. Apa yang menjadi landasan pemikiran Mazhab Hanafi dalam hal perwalian?
3. Bagaimana tinjauan pemikiran Mazhab Hanafi menurut hukum Islam?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemikiran mazhab hanafi dalam status hukum perwalian wanita, selanjutnya penelitian ini memiliki tujuan :

1. Tujuan Penelitian

- a. Kedudukan wanita sebagai wali menurut Mazhab Hanafi
- b. Landasan pemikiran Mazhab Hanafi dalam hal perwalian.
- c. Tinjauan pemikiran Mazhab Hanafi menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu yang penulis miliki selama di perkuliahan berupa penelitian.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam dunia pendidikan terutama pembahasan tentang wali nikah.
- c. Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya, berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.
- d. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam (SHI) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan\

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah sebagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

3. Sumber Data

Sumber data dalam pembahasan ini dapat dikategorikan kepada tiga yaitu :

- a. Data primer yaitu kitab-kitab sumber yang berhubungan dengan masalah yang di kaji seperti Al-Mabsuth karangan Syamsuddin Asy-Syarakhsi.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi perpustakaan (*library reseach*) dan kitab-kitab yang membahas tentang fiqh munakahat diantaranya adalah kitab al-Umm karya Imam asy-Syafi'i, al-Muwattha' oleh Imam Malik, fiqh sunnah oleh Sayid Sabiq, dan beberapa referensi fiqh lainnya serta yang berkenaan dengan Abu Hanifah.
- c. Data tertier yaitu data yang berupa kumpulan dan kompilasi sumber primer dan skunder. Misalnya majalah, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya¹⁶.

4. Metode Analisa Data

- a. Analisa Deskriptif

Metode diskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis, metode ini penulis gunakan untuk memahami pendapat dan ijtihad Mazhab Hanafi tentang perwalian wanita dalam perkawinan.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 184

b. Analisis Komperatif

Penelitian komperatif akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang-orang tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang-orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.

Metode ini akan penulis bandingkan dengan pendapat Mazhab Hanafi dengan pengertian dasar hukum perwalian wanita dalam perkawinan dan pendapat ulama lain tentang hal yang sama.

c. Analisis Content

Suatu analisis data atau pengelolaan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi, metode penulis digunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan yakni metode analisis content.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang memuat, latar belakang masalah, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Biografi Imam Abu Hanifah, kelahiran Imam Abu Hanifah, pendidikan Imam Abu Hanifah, kitab-kitab karangan Imam Abu Hanifah, Guru-guru dan murid Imam Abu Hanifah.

Bab III : konsep wali dalam pernikahan, meliputi pengertian wali, dasar hukum perwalian dalam pernikahan, urutan wali dalam pernikahan, pendapat ulama dalam pernikahan.

Bab IV : Analisis pemikiran Mazhab Hanafi tentang perwalian wanita dalam perkawinan yang meliputi kedudukan wanita sebagai wali dalam

perkawinan menurut Mazhab Hanafi, serta landasan pemikiran Mazhab Hanafi dalam masalah perwalian, serta tinjauan pemikiran Mazhab Hanafi menurut hukum Islam kemudian dilanjutkan dengan analisis penulis.

Bab V : Penutup , Kesimpulan dan Saran

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

A. Kelahiran Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Abu Hanifah adalah Nu'man bin Tsabit yaitu nama sewaktu Abu Hanifah masih kecil (lahir), Abu Hanifah di lahirkan di kota Kufah, kota yang terletak di Iraq, pada tahun 80 Hijriyah (699 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriyah (767 M) bersamaan dengan tahun kelahiran calon ulama besar, yaitu Imam Syafi'i¹.

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Kakek Abu Hanifah adalah Zautha yang berasal dari Kabul (Afganistan) yaitu tawanan perang karena dia berperang melawan Utsman bin Affan sewaktu menaklukkan Persia.

Penaklukan tersebut bukan hanya di Persia tetapi sampai ke Khurasan dan Afganistan, sedangkan Zautha termasuk salah satu pembesar negara yang ditaklukan oleh tentara Utsman dan beliau menjadi tawanan perang, akhirnya diserahkan kepada tentara Islam yang menang dalam peperangan tersebut. Setelah menjadi tawanan perang ia dijadikan budak dan akhirnya bebas dari budak karena masuk Islam. Setelah dibebaskan dari perbudakan ia menetap di Kufah dan selanjutnya ia berdagang sutra di kota Kufah dan lahirlah anaknya yang diberi nama Tsabit yaitu ayah Abu Hanifah².

B. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada awalnya Abu Hanifah seorang pedagang atas anjuran al Sya'bi. Ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu, ia termasuk generasi ketiga setelah Nabi

97 ¹ Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), Cet ke 2, h.

² M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta; Pedoman Ilmu Jaya, 1992), Cet ke-2, h. 49

Muhammad SAW . Pada zamannya terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu³ :

1. Anas ibn Malik di Basrah
2. Abdullah ibn Ubai di Kufah
3. Sahl ibn Sa'd al-Sa'id di Madinah
4. Abu al-Thufailamir ibn Wa'ilah

Setiap orang dapat menjadi terhormat dan hamba Allah yang taat, tidak terkait asal keturunan, misalnya budak atau budak-budak, tetapi ditetapkan oleh usahanya sendiri atau ilmu yang dimilikinya, maka Abu Hanifah dari kecil sudah menunjukkan menuntut ilmu agama Islam.

Abu Hanifah adalah panggilan dari Nu'man ibnu Tsabit bin Zautha. Dalam hal ini terjadi beberapa riwayat tentang panggilan Abu Hanifah, antara lain yaitu⁴ :

- a. Karena salah satu anaknya bernama Hanifah, maka Abu Hanifah berarti bapak dari Abu Hanifah.
- b. Dia adalah salah seorang yang sangat takwa kepada Allah dan perinsipnya tidak dapat digoyahkan, dia tetap berprinsip dan berpegang teguh pada agama Islam, dan tidak tergoyah dengan bujukan apapun, yang diajukan kepadanya baik itu menguntungkan terlebih lagi merugikan dirinya. Dengan demikian Abu Hanifah berarti berasal dari kata hamba, dan Abu Hanifah berarti cenderung, dengan demikian Abu Hanifah berarti hamba Allah yang cenderung taat kepada Allah.
- c. Karena paling cinta pada tinta untuk menulis, sehingga beliau dipanggil oleh guru dan teman-temannya dengan Abu Hanifah, karena Hanifah dalam bahasa Iraq berarti tinta, jadi Abu Hanifah berarti bapak tinta.

³ Sya'ban Muhammad Ismail, *At Tasyri' Al Islami Wa Ath Waruh*, (Mesir; Al Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1985), h. 312

⁴ Ali fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta; Mitra Pusta, 2003), Cet ke-1, h. 3

Terlepas dari keseluruhan panggilan terhadap Abu Hanifah tersebut, maka dia dipanggil Abu Hanifah karena sesuai dengan tingkah laku, perbuatan, ucapan, amalan dan ketekunannya sesuai cita-cita luhur yang dia miliki.

Hal ini menurut orang-orang yang mengetahui hal ini sewaktu hidupnya, dimana hampir seluruh hidupnya digunakan untuk belajar dan mendalami agama Islam dan perlu diketahui bahwa Abu Hanifah ini semenjak kecil sampai dengan meninggal, berada di kota Kufah atau Iraq⁵. Sejak kecil ia belajar sebagaimana anak-anak yang berada di negeri itu, dan ia mulai belajar membaca al-Qur'an serta menghafalnya, ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera dan keluarga yang taat melaksanakan ajaran Islam.

Kakeknya sangat berkesan perjumpaannya dengan Sayyidina Ali, hal itu selalu diceritakannya kepada anak cucunya, termasuk kepada Abu Hanifah, Abu Hanifah selalu mencontoh perbuatan Ali, hal ini terlihat pada jalan pikirannya di kemudian hari. Sebelum Irak masuk atau dikuasai Islam, telah berkembang disana berbagai macam agama, yaitu Nasrani, Yahudi, Budha, Hindu, Animisme, Dinamisme dan sebagainya.

Islam masuk ke negeri Irak mendapat bermacam-macam tantangan, namun berkat keuletan para ulama dan atas pertolongan Allah, pada akhirnya agama selain agama islam kian hari makin punah. Selain itu di Irak merupakan tempat timbul bermacam-macam aliran-aliran filsafat, baik yang berasal dari Romawi, Yunani dan negeri-negeri barat lainnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terdapat beberapa faktor yang mendorong atau mempermudah Abu Hanifah untuk belajar mendalami agama Islam dan ilmu pengetahuan lainnya, yaitu :

⁵ Sya'ban Muhammad Ismail, *Op, Cit*, h. 313

- a. Dorongan dari keluarga, sehingga Abu Hanifah dapat memusatkan perhatiannya dalam mempelajari atau mendalami ajaran Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, termasuk mempelajari bahasa Arab.
- b. Keyakinan yang mendalam tentang agama yang mendalam dikalangan keluarga.
- c. Kekagumannya terhadap tingkah laku serta ilmu pengetahuan yang dimiliki Sayidina Ali, Umar dan Abdullah Ibn Mas'ud.
- d. Kedudukan kota Kufah, Basrah, dan Bagdad sebagai kota ilmu pengetahuan dan filsafat yakni kota tempat tinggalnya.
- e. Kota Kufah, Basrah dan Bagdad juga merupakan kota pusat ilmu pengetahuan agama Islam.

Pada mulanya Abu Hanifah menuntut ilmu agama hanya sekedar untuk keperluan sendiri, termasuk untuk berdagang, karena ia lebih suka membantu orang dari pada menuntut ilmu. Namun pada suatu hari ia bertemu dengan gurunya yaitu Amir bin Syarahil wafat pada tahun 104 H (721 M). Dalam itu ia menceritakan kepada gurunya itu bahwa ia lewat di muka rumah Asya'bi beliau sedang duduk-duduk, lalu saya dipanggil dan ditanya, "Apakah kesibukanmu?", saya menjawab "Kepasar", lalu ditanya "Mengapa tidak ke ulama?", saya menjawab "saya tidak pergi ke ulama", kemudian beliau mengatakan "Jangan sekarang pergi ke pasar, pergilah ke ulama, sesungguhnya saya melihat engkau ada harapan".

Dalam hal ini Abu Hanifah mengatakan bahwa ia berkesan atas hasil perjumpaannya dengan Asy-Sya'bi itu, kemudian saya tinggalkan berdagang dan mulailah menuntut ilmu. Dengan demikian sejak itulah Abu Hanifah mulai menuntut ilmu dan yang mula-mula dipelajarinya adalah ilmu kalam dan mengadakan diskusi dengan ulama-ulama yang beraliran ilmu kalam, seperti dengan orang-orang yang beraliran Mu'tazilah, Syi'ah Khawarij dan Maturidiyah.

Abu Hanifah tidak segan-segan mencurahkan tenaga, pikiran dan bahkan harta benda untuk membiayai keperluan berdiskusi. Abu Hanifah sering pergi ke kota Irak lainnya untuk menemui ilmu pengetahuan, setelah mendalami ilmu kalam barulah ia berlatih mempelajari ilmu fiqh, dengan cara mendatangi ulama-ulama ahli fiqh dari bermacam-macam aliran.

Ada empat sahabat Rasul yang sangat berkesan bagi Abu Hanifah dan yang ikut mempengaruhi pokok-pokok pikiran atau jalan pikiran dari Abu Hanifah, keempat sahabat itu ialah:

- a. Umar bin al-Khattab, Abu Hanifah tertarik pada metode Umar dalam menetapkan hukum dengan menggunakan “kemaslahatan ummah” kepentingan umum sebagai dasarnya.
- b. Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah terkesan dengan ketekunannya dalam mempelajari dan mendalami ajaran Islam.
- c. Abdullah ibnu Abbas, Abu Hanifah terkesan atas metodenya mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan dari Abdullah Ibnu Abbas inilah Abu Hanifah mendapat ilmu pengetahuan Al-Qur'an dan cara-cara menafsirkannya.

Dalam hal ini Abu Hanifah pernah dituduh bahwa Abu Hanifah dalam menetapkan hukum hanya menggunakan akal saja, tuduhan tersebut disampaikan kepada khalifah Abu Ja'far al-Mansur (Khalifah Abasiyyah) dengan tuduhan itu Abu Hanifah dipanggil untuk menghadap khalifah, dan khalifah menanyakan antara lain ”Dari mana ilmu itu diperoleh?”, jawaban Abu Hanifah bahwa ilmunya diperoleh dari sahabat Nabi yaitu Umar, Ali, Ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Abbas, sahabat-sahabat tersebut merupakan ulama yang jauh melebihi kepandaianya. Mendengar jawaban, khalifah Abu Hanifah Abu Ja'far al-Mansur merasa puas dengan mengatakan, “Aku percaya kepadamu”.

Diantara guru Abu Hanifah adalah Muhammad bin Abi Sulaiman, wafat tahun 120 H, dan Abu Hanifah belajar kepadanya selama 12 tahun, setelah gurunya itu wafat,

Abu Hanifah yang menggantikannya sebagai guru, sesuai dengan wasiat gurunya itu, dengan demikian Abu Hanifah mulai menjadi guru sejak tahun 120 hijriyah. Didalam mengajar Abu Hanifah menggunakan metode yang ada didalam Al-Qur'an, dengan sungguh-sungguh meyakinkannya, maka muncullah murid-murid Abu Hanifah yang kenamaan, seperti Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i pernah berkata bahwa para ahli fiqh sesudah Abu Hanifah adalah berasal dari ilmu Abu Hanifah. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya, ia pergi ke Mesir, Makkah dan Madinah guna menambah wawasannya tentang Islam.

Pada tahun 130 Hijriyah, Abu Hanifah berangkat ke Makkah dan menetap disana selama enam tahun, selama di Makkah beliau mengadakan diskusi atau musyawarah dengan para ulama terkemuka diwaktu itu. Demikian juga beliau bertemu dengan ulama Syi'ah, Zaidiyah, yakni ulama ahli hadis, sehingga beliau dapat mengadakan tukar pikiran dengan mereka itu, juga Ja'far ash Shidqi.

Selain beliau berjumpa dengan muridnya Ibnu Abbas yang kemudian diajaknya pergi ke Madinah yang bernama Ja'far ash-Shidqi untuk mengadakan tukar fikiran dengannya, setelah beliau pulang dari Makkah dan Madinah beliau tetap mempelajari ilmu pengetahuan agama, beliau sangat menghargai pendapat orang lain walaupun bertentangan dengan pendapatnya, karena perbedaan pendapat merupakan rahmat dari Allah.

C. Kitab – Kitab Karangan Imam Abu Hanifah

Dalam menyusun buku fiqh, Imam Abu Hanifah pertama-tama mencari keterangan dari al-Qur'an bila dalam Al-Qur'an tidak diperoleh suatu keterangan beliau mencarinya dalam Sunnaturosul, hadits yang shaheh serta mashur, tersiar dalam karangan orang-orang terpercaya, biar dalam Al-Qur'an dan sunnaturosul pun beliau

tidak temukan, maka beliau mengambil keterangan dari *Atsarush-Sahabi* (ucapan atau perbuatan para sahabat), dalam memilih *Atsarush-Sahabi* itu beliau bebas, tidak memilih atau memilih salah seorang dari mereka⁶.

Bila ditakdirkan dalam *Atsarush-Sahabi* itu tidak terdapat perbedaan atau sama sekali beliau tidak memperoleh keterangan maka mulailah beliau mencurahkan segala kemampuannya dalam menggali dalil dari nash Al-Qur'an dan hadits untuk menetapkan hukum yang bersangkutan, tindakan beliau yang terakhir dinamakan *Ijtihadi*⁷.

Imam Abu Hanifah, oleh karena memang seorang yang ahli tentang fiqh, keahliannya jarang di dapat keahliannya jarang didapat bandingnya pada masa itu, dan ahli tentang ilmu kalam, maka di kala itu beliau masih hidup, tidak sedikit para ulama yang pernah menjadi murid atau berguru kepada beliau, dan tidak sedikit pula para cerdik-pandai yang ikut mengambil dan ikut mengambi atau menghisap ilmu pengetahuan beliau, oleh sebab itu, di kala beliau telah wafat, dari antara para ulama yang terkenal menjadi sahabat karib dengan beliau, seperti imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan, Imam Hasan Bin Ziyad dan lain-lainnya, meskipun mereka dari sebagian masalah-masalah hukum keagamaan ada yang menyalahi, ada yang beralawanan dan adapula yang berbeda dengan pendapat atau buah pikiran beliau tetapi sebagian besar mereka itu telah menyepakati dan sesuai dengan jalan atau cara yang ditempuh/ dilalui oleh beliau.

Perkataan-perkataan dan buah pikiran Imam Abu Hanifah tentang masalah-masalah hukum keagamaan, ketika dihimpun oleh para sahabat beliau yang terdekat adalah dicampur juga dengan perkataan-perkataan atau pendapat mereka masing-masing dengan mazhab Imam Hanafi. Karena aliran mazhab beliau itulah yang asli, dan soal-

⁶ Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab* (Bandung; CV. Sinar Bandung, 1992), Cet. Ke-2, h. 26

⁷ *Ibid*, h. 26

soal yang menyalahi dengan pendapat berlawanan dengan perkataan beliau, adalah sedikit sekali.

Menurut riwayat, bahwa para ulama Hanafiyah (yang bermazhab Hanafi) telah membagi masalah-masalah “Fiqih”. Bagi mazhab beliau ada tiga bagian atau tingkatan yakni :

- Masa-ulu-Ushul
- Mas-ulu-Nawadir
- Al-Fatawa wal Waqi’at

Yang dinamakan dengan “*Masa-Ulu-Ushul*” itu kitabnya dinamakan “*Dalahirur-Riwayah*” kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya yang terkenal, seperti Imam Abu Yusuf dan lain-lainnya. Tetapi dalam kitab ini berisi masalah-masalah keagamaan, yang sesudah dikatakan, dikupas dan ditetapkan oleh beliau, lalu dicampur dengan perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat dari para sahabat beliau yang terkenal tadi. Imam Muhammad bin Hasan menghimpun “*Masa-ulu-Ushul*” itu didalam enam kitab “ *Dalahirur Riwayah*” yang mana ialah:

- Kitab al-Mabsuth
- Kitab al-Jami’ush-shaghir
- Kitab al-Jami’ul-Kabir
- Kitab as-Sairush-Shaghir
- Kitab as-Sairul-Kabir
- dan Kitab az-Ziyadat

Sebab dinamakan dengan *Dalahirur Riwayah* karena masalah-masalah yang diriwayatkan itu dari Imam Muhammad bin Hasan dengan riwayat-riwayat yang kepercayaan, yang berbeda dengan *Masailun-Nawadir* tentang keadaan enam macam

kitab itu, pada masa permulaan abad IV hijrah telah dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadhl. Muhammad bin Ahmad al Marwazy, yang terkenal dengan nama al-Hakim asy-Syahid, wafat pada tahun 334 H, dan kitabnya dinamakan "*Al-Kafy*" ini disyarah (diberi penjelasan) oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal As-Sarkhasy, wafat pada tahun 490 H dan kitabnya dinamakan *Al-Mabsuth*.

Dan yang dinamakan dengan "*Masa-Ilun-Nawadir*" ialah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan para sahabat beliau dalam kitab lain, yang selain dari kitab, "*Dlahirur-Riwayah*" tersebut ialah seperti "*Harunniyat*" dan "*Jurjaniyyat*" dan "*Kaisanniyat*" dan bagi Imam Muhammad bin Hasan, dan kitab "*Al-Mujarad*" bagi Imam Hasan bin Ziyad.

Adapun yang dinamakan dengan "*Al-Fatwa Wal-Waqi'at*" ialah yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari istimbathnya para ulama mujtahid yang bermazhab Imam Hanafi yang datang kemudian, pada waktu mereka ditanyai tentang masalah-masalah hukum-hukum keagamaan, padahal mereka tidak dapat menjawabnya, lantaran dalam kitab-kitab mazhabnya terdahulu tidak didapati keterangannya, maka mereka berijtihad guna menjawabnya. Dan tentang keadaan kitab "*Al-Fatwa Wal-Waqi'at*" yang pertama kali, ialah kitab "*An-Nazawil*" yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits as-Samarqandy, wafat pada tahun Hijriah.

Perlu dijelaskan tentang keadaan kitab "*Dlahirur-Riwayah*" tersebut:

- a. Kitab "*Al-Mabsuth*" kitab ini adalah kitab sepanjang-panjang kitab yang dihimpun dan disusun oleh Imam Muhammad bin Hasan, yang didalamnya berisi beribu-ribu masalah keagamaan yang dipegang dan ditetapkan oleh Imam Hanafi yang berisi pula beberapa masalah keagamaan yang menyalahi pegangan atau penetapan beliau yang utama itu, ialah dari imam yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan berisisi pula tentang perselisihan pendapat antara Imam Hanafi dengan Imam Ibnu Abi Laila.

Orang yang meriwayatkan kitab “*Al Mabsuth*” tadi ialah Imam Ahmad bin Hafsh Al-Kabir, seorang alim besar bekas murid Imam Muhammad bin Hasan.

- b. Kitab “*Al-Jami’ush-Shaghir*” kitab ini berisi beberapa masalah yang diriwayatkan dari Imam Isa bin Abban dan Imam Muhammad bin Sima’ah, yang kedua beliau inipun murid Imam Muhammad bin Hasan, dan kitab ini berisi 40 pasal dari pada pasal-pasal fiqih, yang permulaannya pasal “*Ash-Shalah*” tetapi didalam kitab ini tidak diberi bab-bab pasalnya. Oleh sebab itu lalu di atur, disusun dan di bab-bab oleh Al-qadli Abuth-thahir, Muhammad bin Muhammad ad-Dabbas, untuk memudahkan bagi barang siapa yang hendak mempelajarinya.
- c. Kitab “*Al-Jami’ul-Kabir*” kitab ini berisi seperti kitab-kitab yang kedua tadi, hanya saja ada lebih panjang uraian dan keterangannya.
- d. Kitab “*As-Sairus-Shaghir*” kitab ini berisi masalah-masalah ijtihaad semata-mata.
- e. Kitab “*As-Sairul-Kabir*” kitab ini berisi masalah-masalah fiqh, karangan terakhir dari Imam Muhammad bin Hasan, orang yang pertama kali meriwayatkan kitab ini dari Imam Muhammad bin Hasan, ialah Imam Abu Sulaiman al-Jauzajany dan Imam Ismail bin Tsuwabah.

Adapun dasar-dasar ijtihaad Abu Hanifah dalam menyelesaikan maslah fiqih adalah kitabullah, sunnaturrasul, dan atsar-atsar yang shahih serta telah masyhur (diantara para ulam yang ahli), fatwa-fatwa sahabat, qiyas dan istishan serata adat yang telah berlaku didalam masyarakat umat islam⁸. Sepanjang riwayat, bahwa Imam Hanafi adalah seorang yang mula-mula sekali yang merencanakan ilmu fiqih dan mengatur serta menyusunnya dengan di bab-bab sepasal demi sepasal untuk memudahkan orang yang mempelajarinya. Karena dimasa para sahabat dan para tabi’in fiqih itu belumlah

⁸ Roestan dkk, *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum dan Syari’at Islam*, (Jakarta; CV. Kalam Mulia, 1992), Cet. Ke-1, h. 360

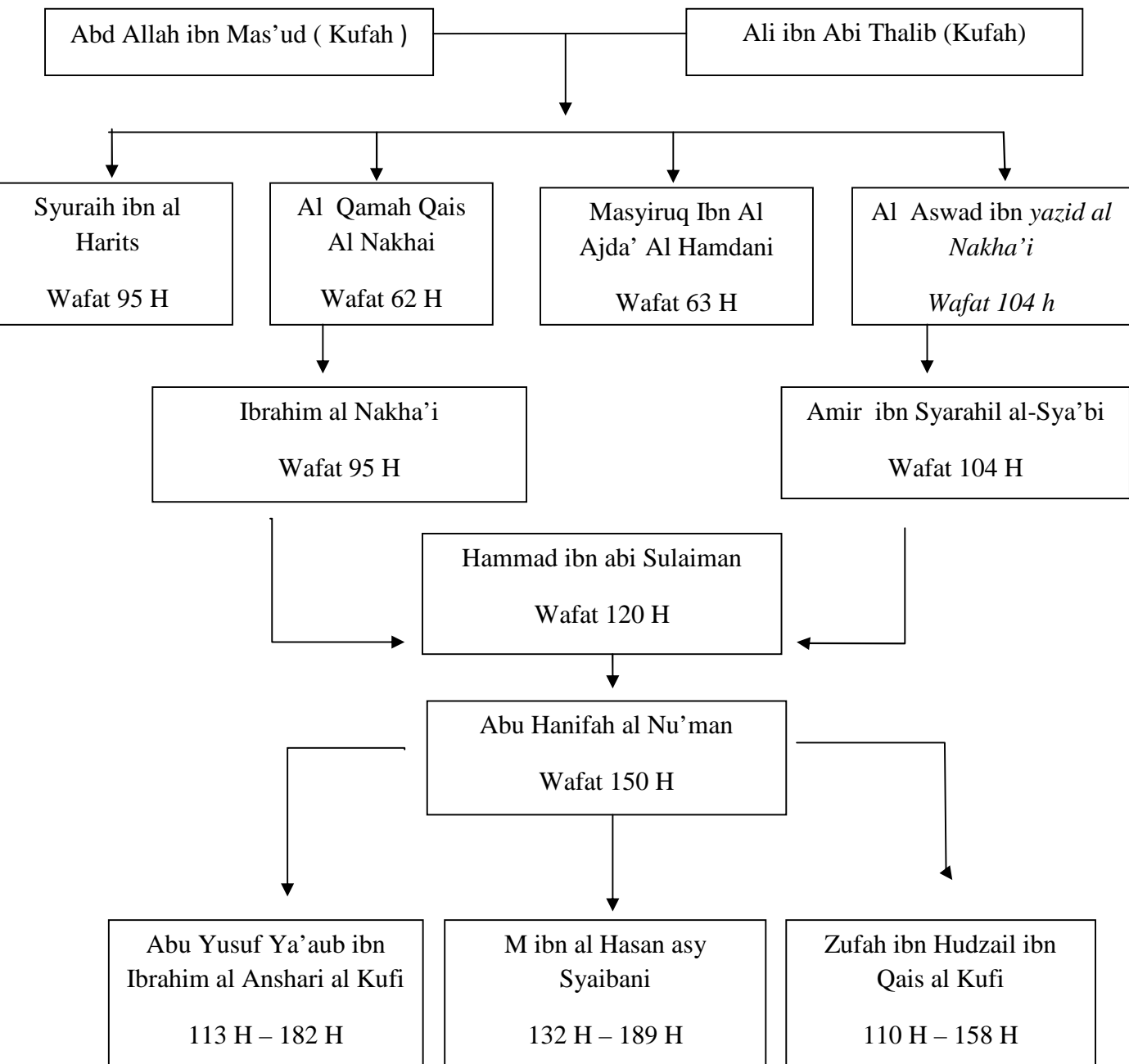
dihimpun dan disusun, beliau setelah menguatirkan hilangnya ilmu pengetahuan itu, barulah beliau merencanakan mengatur dan menyusunnya menjadi beberapa bab⁹.

Perlu dijelaskan bahwa Imam Hanafi ada mempunyai kitab yang dinamakan dengan “*Al-Fiqhul-Akbar*” kitab ini berisi khusus urusan ilmu kalam, ilmu aqaid atau ilmu tauhid, kitab ini diriwayatkan dari Imam Abi Muthi Al Hakam bin Abdullah Al Bakhy; kemudian disyarah oleh Imam Abu Manshur Isma’il Al Maturidy, dan oleh Imam Abil Muntaha Al Maula Ahmad bin Muhammad Al Maghnisnya. Pada awalnya Abu Hanifah adalah seorang pedagang atas anjuran al- Sya’bi, kemudian beralih menjadi pengembang ilmu, Abu Hanifah belajar fiqih kepada ulama’ aliran Irak (ra’yu) ia dianggap repesentatif untuk mewakili pemikiran ra’yu, oleh karena itu ita perlu mengetahui guru-guru dan murid-muridnya sehingga dari sehubungan guru-murid kita dapat menyaksikan bahwa dia termasuk salah seorang generasi pengembang aliran ra’yu¹⁰.

⁹ *Ibid* , h. 361

¹⁰ Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam* , (Bandung : PT Remaja Rosda Karya tth), h. 73

GURU-GURU DAN MURID ABU HANIFAH¹¹.



¹¹ Juhaya s. Praja, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. Ke-3, h. 47

BAB III

KONSEP WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Wali

Kata wali berasal dari bahasa arab yaitu *al-Wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pimpinan atau penguasa, masdarnya adalah *waliyah* isim fa'il nya yaitu *wali* artinya orang yang memimpin atau yang menguasai¹.

Secara etimologis, wali mempunyai banyak pengertian antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang janji nikah dengan pengantin laki-laki);
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama²;
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya³;
- e. Pecinta, saudara atau penolong⁴.

¹ Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Almarbawi*, (Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby,tth) , Juz II, h.398

² Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat,Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawali pers ,2009), Ed 1, h. 89-90

³ Luwis Ma'luf Masu'i, *Kamus Murjit*, (Beirut; ttp, 1946), h. 919

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1989), h. 1007

Pengertian wali di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat, adapun yang dimaksud dengan wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan.

Sedangkan pengertian wali menurut istilah fiqh adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita, karena wali merupakan syarat sah nikah dan akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan tidak sah.

Abdurrahman Al-Jaziry mengatakan tentang wali dalam Al-Fiqh ‘ala Mazaahib Al-Arba’ah, wali dalam nikah adalah:

هو: مايتوقف عليه
يصح بدونه.

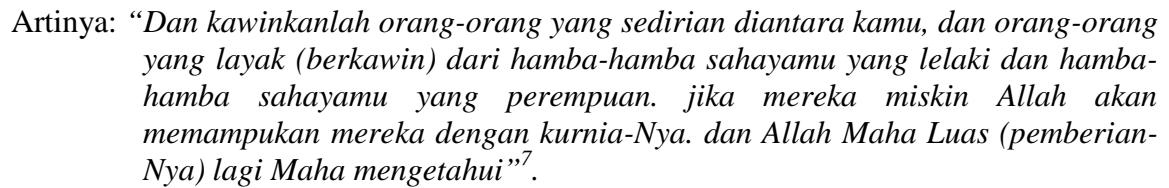
Artinya: “Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya wali”⁵.

Mayoritas ulama shalaf maupun khalaf antara lain Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Abu Hurairah, Aisyah, Malik, Syafi’i, Ahmad, Ishak, Abu Ubaid, Ats-Tsauri, dan penganut mazhab Zhahiri berpendapat bahwa wali adalah syarat keabsahan akad pernikahan. Sehingga seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, maka nikahnya batal⁶. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nuur ayat 32:



























































⁵ Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqh ‘ala Mazaahib Al-Arba’ah*, (Beirut: Daar Al-Fikr, t. Th), Juz IV, h. 29























⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-2, h. 209-210



B. Dasar Hukum Perwalian Dalam Pernikahan

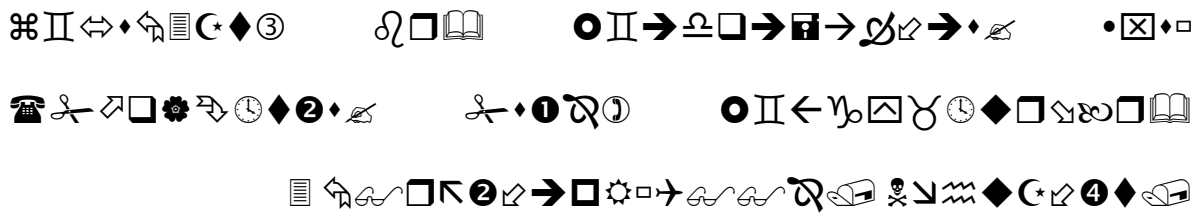



























Adanya wali bagi seorang wanita atau seorang yang tidak mukallaf dalam akad nikahannya merupakan rukun akad nikah tersebut, dasarnya adalah firman Allah⁹ :

⁹ *Ibid.*, h. 47



Artinya: “. . . . Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. . . . “(Q.S. Al Baqarah : 232).

“Larangan” dalam ayat ini ditujukan kepada para wali sesuai dengan sebab diturunkannya ayat diatas, maksudnya ialah bahwa para wali termasuk diantara orang-orang yang dapat menghalangi berlangsung nya suatu perkawinan, seandainya suatu perkawinan itu dilaksanakan tanpa meminta izin kepada mereka, atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan agama¹⁰.

Dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim¹¹.

سعيد وقتيبه سعيد يحيى يحيى والفظله

جابر عن

الايام بنفسها وليه نفسها واذنها صماتها

Artinya: “Diceritakan dari Said ibn Mansur dan Waqotibihi ibn Said berkata, dan diceritakan oleh Yahya Ibn Yahya, dari Abdullah Ibn Padil dari Napik Ibn Jabir dari Ibnu Abbas R.A bahwa Rasulullah S.A.W bersabda :”orang yang tidak mempunyai jodoh itu lebih berhak atas (perkawinan) dirinya dari pada walinya, dan gadis itu dimintakan perintahnya (untuk mengawinkannya) kepadanya, dan tanda izinya adalah diamnya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadist Ibnu Abbas diatas menerangkan bahwa para wali termasuk diantara orang-orang yang hak atas perkawinan orang-orang yang dibawah perwaliannya,

94 ¹⁰ Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1974), h. 93-

¹¹ Imam Nawawi, *Shohih Muslim*, (Lebanon; Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1971), Jilid IV, h. 204

sekalipun haknya itu lebih kecil dibandingkan dengan hak orang yang dibawah perwakilannya terhadap perkawinannya.

Hak wali itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun selama ia dapat melaksanakan haknya itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Apabila dalam melaksanakannya haknya itu para wali tidak mengindahkan ketentuan agama, maka hak perwalian itu dipindahkan kepada wali yang lain dengan keputusan hakim.

Dengan demikian pentingnya wali dalam pernikahan agar wanita tidak mengurus sendiri hal-hal yang bisa mengurangi perasan malu dan murahnya (harga dirinya) Syeikh Waliyullah Ad-Dahlawi berkata: "Disyaratkan wali dalam pernikahan agar wanita terpelihara harga dirinya, karena bila waniat mengurus sendiri pernikahannya, maka hal itu dapat menampakkan ketidak tahu maluannya serta kebodohnya. Sepatutnya dibedakan antara pernikahan dan pezina, keduanya dibedakan dengan adanya pengumuman atau pemberitahuan. Dan kehadiran wali merupakan bentuk paling representatif dan utama dalam persoalan ini¹²

Para ulama Mazhab dan Maliki juga menganggap persetujuan untuk menikahkan seseorang tertentu dengan anak asuhnya, sebagai salah satu unsur penting bagi sahnya perkawinan dalam Islam, sedangkan Mazhab Hanafi dan Hambali menganggap izin wali hanya sebagai suatu syarat saja, kedua mazhab terakhir ini justru menekankan pentingnya Ijab dan Qabul,¹³ :

Imam Syafi'i berkata: "Tidak ada hak untuk menjadi wali bagi seseorang selama ada bapak si wanita, apabila bapaknya sudah meninggal dunia, maka yang menggantikan posisinya adalah kakek, kalau tidak ada kakek maka digantikan oleh buyutnya, karena semuanya adalah bapak. Sebab yang paling berhak menikahkan wanita

¹² Isham bin Muhammad asy-Syarif, *Syarah Kumpulan Hadits Shahih Tentang Wanita*, (Jakarta :PT Pustaka Azzam, 2006), h. 340

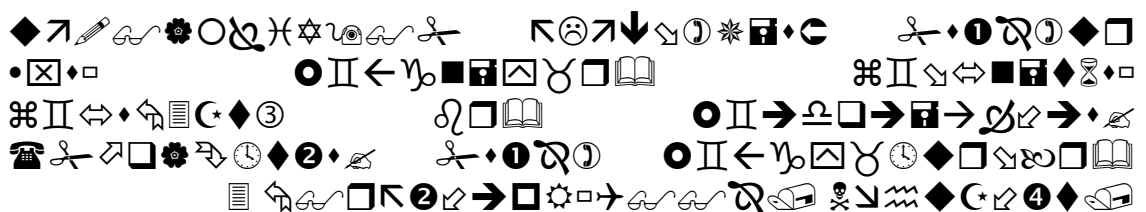
¹³ Abdurrahman., *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta; PT Rineka Citra, tth) , h. 40

adalah dari jalur bapak, bukan dari jalur persaudaraan, berbeda halnya dengan masalah waris”¹⁴.

Tidak ada hak perwalian bagi saudara seibu dan tidak pula kakek dari pihak itu (bapak si ibu) karena mereka tidak tergolong *ashabah* (ahli waris yang mengambil semua harta wrisan) dan karena perwalian hanya menjadi hak *ashabah*. Apabila saudara laki-laki yang ada adalah anak-anak paman dan tidak ada yang lebih dekat hubungan kekeluargaan kepada wanita itu kecuali mereka, maka mereka berhak menjadi wali atasnya sebab mereka juga tergolong *ashabah*¹⁵.

Bila ayah atau keluarga dekatnya tiada, maka raja atau amir atau penguasa, dapat menjadi wali. ada suatu kasus seorang wanita menemui nabi saw dan meminta dirinya untuk dinikahkan, lalu dia dinikahkan dengan seorang lelaki yang bahkan tidak dapat membayar mahar karena miskinnya. Pada waktu itu tidak ada wali dari keluarganya (ayah atau keluarga dekat lainnya), barang kali Nabi Saw berperanan sebagai walinya dan menikahkannya karena dia telah cukup dewasa untuk memahami tindakannya itu¹⁶.

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an tertentu, tak ada disebutkan sama sekali tentang wali, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imraan ayat 232:



Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka

janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal

¹⁴ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet ke 3, h. 356

¹⁵ *Ibid*, h. 356

¹⁶ Abdurrahman, *Op, Cit*, h. 41

suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf".

Namun ada ayat lain yang membicarakan tentang perlunya wali dan keputusannya yang seksama. Sebagai contoh, dalam hal seseorang "*Thayyibah*" (seorang wanita yang telah mendambakan suami). Al-Qur'an menyebutkan dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 221:

.....
Artinya: "Dan janganlah wanita mukmin menikah dengan seorang musyrik sampai mereka beriman"¹⁷.

Ayat ini tak diragukan lagi ditujukan kepada para wali yang karenanya tak berhak memberikan izin dalam kasus sedemikian itu. Sebagaimana telah kita ketahui sebelum ini, seorang wanita yang telah diceraikan tak dilarang untuk menikah lagi dengan cara yang ma'ruf sedangkan dalam hal janda, Al-Qur'an menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 240:

.....
Artinya: "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

¹⁷ Departemen Agama RI, *Op, Cit*, h. 42

Ayat ini mengakui tentang hak janda untuk menikahkan dirinya sendiri serta melarang wali untuk menentangnya. Bila wanita itu sendiri telah terpuaskan atau senang. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa "Janda dan wanita yang dicerai memiliki hal yang lebih besar untuk mengatur dirinya sendiri dalam hal perkawinan daroi pada walinya". (HR.Abu Daud).

Meskipun Imam Abu Hanifah memberikan kebebasan kepada anak gadis yang telah mencapai usia puber untuk menikah berdasarkan pilihannya, namun izin wali tetap merupakan syarat perkawinan. Dia membantah bahwa wanita yang telah mencapai usia dewasa dapat mengatur hak miliknya tanpa merujuk kepada seorang wali sehingga dia juga berhak menentukan pilihannya. Namun pada saat yang sama tak dapat disangkal ada rasa segan pada anak gadis tersebut sehingga karenanya dia tak memiliki pengalaman yang sama dengan lelaki dan perkara seperti yang dimiliki seorang janda atau wanita yang dicerai, oleh karena itu maka dalam pemilihan suami yang cocok sepatutnya diserahkan pada persetujuan ayah atau wali lainnya yang akan menyelesaikan serta melindunginya dari penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya memperuntukkan hawa nafsunya saja. Namun diatas ini semua, karena perkawinan itu tergantung pada persetujuan si gadis bukan izin walinya yang dalam kenyataan hanya berkewajiban melindunginya, maka pada hakikatnya keinginanlah yang harus didahulukan menurut Mazhab Hanafi.

C. URUTAN WALI DALAM PERNIKAHAN

No	Mazhab Syafi'i ¹⁸	Mazhab Maliki ¹⁹	Mazhab Hambali ²⁰	Mazhab Hanafi ²¹	Mazhab Hanafi dari keturunan ibu ²²
1	Bapak	Bapak	Bapak	Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya menurut garis lurus kebawah	Ibu
2	Kakek (ayah dari bapak)	Washi (orang yang menerima wasiat dari bapak)	Washi (orang yang menerima wasiat dari bapak)	bapak, kakek dan seterusnya menurut garis lurus keatas.	Ibu dari ayah
3	Saudara laki-laki kandung	Anak laki-laki	Anak laki-laki	Saudara laki-laki kandung	Anak perempuan
4	Saudara laki-laki seayah	Cucu laki-laki	Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah	Saudara laki-laki seayah	Anak perempuan dari anak laki-laki
5	Anak laki-laki dari saudara laki-laki	Saudara laki-laki sekandung	Saudara kandung	Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki	Anak perempuan dari anak perempuan
6	Paman (saudara ayah)	Saudara laki-laki seayah	Saudara sepapak	Anak laki-laki dari saudara laki-laki sepapak	Anak perempuan dari cucu laki-laki
7	Anak paman dan seterusnya, bila semuanya tidak ada, perwalian beralih ketangan hakim	Anak laki-laki dari saudara kandung	Anak laki-laki dari saudara bapak dan seterusnya kebawah	Paman kandung	Anak perempuan dari cucu perempuan dan seterusnya kebawah
8		Anak laki-laki dari saudara seayah	Paman kandung	Paman sepapak	Ayah dari ibu
9		Kakek	Anak laki-laki dari paman sepapak	Anak laki-laki dari paman kandung	Saudara perempuan kandung
10		Paman kandung	Anak laki-laki dari paman kandung	Anak laki-laki dari paman sepapak	Saudara perempuan sepapak
11		Paman seayah	Anak laki-laki dari paman sepapak dan seterusnya kebawah		Saudara seibu dan anak-anaknya
12		Anak paman kandung	Saudara laki-laki dari kakek		Bibi (saudara perempuan dari bapak)
13		Anak paman seayah	Anak laki-laki dari saudara kakek		Saudara laki-laki dari ibu (mamak)
14		Ayah dari kakek	Paman dari bapak (kakek)		Saudara perempuan dari ibu
15		Paman dari ayah	Anak-anak dan seterusnya kebawah		Anak perempuan dari paman dan bibi
16		Orang yang mengasuh perempuan			Kemudian anak-anaknya dan begitulah seterusnya kebawah

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2006), Cet Ke-18, h. 347-348

D. Pendapat Ulama Tentang Wali dalam Pernikahan

Dalam pernikahan yang diutamakan menjadi wali adalah ayah. Apabila ayah tidak ada kakek menjadi wali, apabila kakek tidak ada, maka yang menjadi wali ialah saudara laki-laki seibu-seayah, demikianlah seterusnya kebawah²³.

Wali yang ada yang diutamakan disebut “ wali yang dekat “(wali aqrab), dan wali yang lain disebut “wali yang jauh” (wali ab’ad), Para ulama’ fiqih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia menjadi syarat sah pernikahan atau tidak.

Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali, pendapat ini juga dikemukakan oleh imam Syafi’i. Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa wanita merdeka yang sudah baligh tidak mensyaratkan kehadiran atau izin wali sebagai syarat keabsahan pernikahannya, dan syarat ini hanya berlaku pada konteks pernikahan wanita yang masih belia. (belum baligh)²⁴.

Abu Daud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkannya pada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukmnya sunnah bukan fardu, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk

¹⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta :PT Hidakarya Agung, 1990), Cet Ke-12, h. 57

²⁰ Darul Kitab Alamiyah, (Bairut Libanon, 1990), h. 31

²¹ Abdurrahman Al Jazari, *Kitab Fiqih Empat Mazhab*, (Lebanon : al Fikr, 1986), Juz IV, h. 28

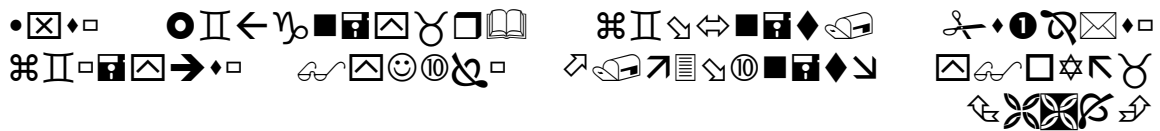
²² *Ibid*, h. 52

²³ Kamal Muktar, *Op, Cit* 102

²⁴ Sohari Sahrani, *Op, Cit* , h. 212

menikahkannya. Imam Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahkannya²⁵.

Mereka yang mengatakan bahwa wali itu menjadi syarat sahnya pernikahan dengan dasar, Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 234 :



Artinya: “kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka.....”²⁶.

Menurut mereka, ayat ini ditujukan kepada wali, jika mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian, tentu mereka tidak dilarang untuk menghalang-halangi.

Adapun golongan yang tidak mensyaratkan wali mengemukakan alasan dengan firman Allah SWT :



Artinya: “.... kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri merek menurut yang patut.”

²⁵ Ibid, h. 91

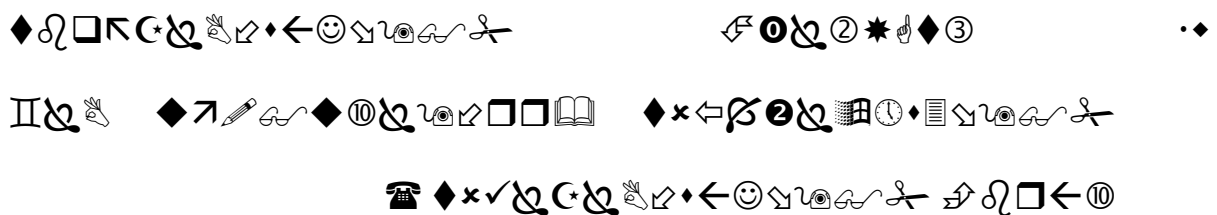
²⁶ Departemen Agama RI, *Op, Cit*, h. 47

Menurut mereka ayat tersebut merupakan dalil atas diperbolehkannya wanita untuk menikahkan dirinya sendiri, mereka juga mengatakan bahwa perbuatan menikahkan yang disandarkan pada wanita, banyak disebutkan dalam Al-Qur'an.

Kedudukan wali dalam suatu pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi oleh sebab itu wali bertanggungjawab atas sahnya akad pernikahan, oleh karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut²⁷ :

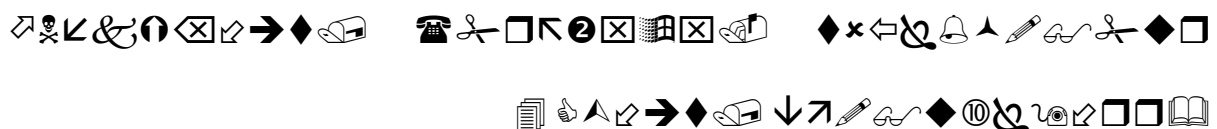
a. Islam

Disyaratkan wali adalah seorang muslim apabila yang kawin itu orang muslim pula, berdasarkan firman Allah SWT :



Artinya: “*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.* (Ali Imran : 28)²⁸.

Perwalian atas orang kafir dilakukan dan diangkat oleh orang kafir sendiri, berdasarkan firman Allah :



²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algersindo, 2006), Cet. Ke-3, h. 384

²⁸ Departemen Agama RI, *Op, Cit* , h. 66

Artinya: “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain”

Berbeda pendapat para ahli fiqih tentang masalah wanita sebagai wali. Imam malik, syafi’i dan hambali berpendapat bahwa tidak sah suatu pernikahan apabila wanita yang menjadi walinya dan tidak sah suatu pernikahan apabila wanita menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali). Abu Hanifah berpendapat bahwa sah suatu pernikahan yang walinya seorang wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri²⁹.

Pendapat Imam Malik, Syafi’i dan Hambali berdasarkan Hadist Ibnu Majah :

حدثنا جميل	العقيلي	هشام
سيرين	هريرة	عليه :
,	نفسها.	الزانية هي نفسها ³⁰

Artinya: “Kami dikhabarkan oleh Jamil Hasan Al Atakiya, kami dikhabarkan oleh Muhammad bin Marwan Al Uqaili, kami dikabarkan oleh Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Syirin dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda “ perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri sebab hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri” (H.R Ibnu Majah)

Pendapat Abu Hanifah beralasan dengan hadis rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

عبد	وقتية	سعيد	يحي	يحي والفظله
الايام	بنفسها	وليها	نفسها واذنها صماتها	جبير عن

²⁹ Kamal Mukhtar, *Op, Cit* , h. 95

³⁰ Abi Abdillah ibn Yazid al Kazwaini, *Loc, Cit* , h. 591

Artinya: “Diceritakan dari said bin mansur dan Quthaibah bin said lalu ia berkata kami menceritakan kepada malik, dan kami menceritakan pula kepada yahya bin yahya dan dilafazhkan yahya bagi malik, aku berkata kepada malik ceritamu dan abdullah bin fadil dan nafi bin jabir dari ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah S.A.W bersabda :”orang yang tidak mempunyai jodoh itu lebih berhak atas (perkawinan) dirinya dari pada walinya, dan gadis itu dimintakan perintahnya (untuk mengawinkannya) kepadanya, dan tanda izinya adalah diamnya” (H.R. Bukhari Dan Muslim)³¹.

Hadist Ibnu Abbas menerangkan bahwa orang menerangkan bahwa orang yang akan kawin itu, termasuk wanita lebih berhak atas perkawinannya dari pada walinya, karena haknya itu, ia dibolehkan menikahkan dirinya sendiri, sebagaimana hak wali yang boleh pula melaksanakan perkawinannya itu, dalam pada itu wanita boleh pula menikahkan orang yang dibawah perwaliannya, hal ini sesuai menurut Abu Hanifah dengan perbuatan Aisyah R.A istri Nabi SAW.

Aisyah pernah mengawinkan anak perempuan saudaranya, abdurrahman yang pada waktu itu sedang berpergian, setelah abdurrahman kembali dan mengetahui perbuatan saudaranya aisyah terhadap putrinya, iapun marah kepada aisyah, tetapi tidak ada riwayat yang menyatakan perkawinan putri Abdurrahman itu dinyatakan batal.

b. Baligh

Maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak syah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya.

c. Berakal

Maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak syah bila menjadi wali bagi anak gadisnya

d. Laki-laki

e. Adil (cerdas)

Mazhab syafi'i mensyaratkan seorang yang cerdas berdasarkan hadist :

³¹ Imam Nawawi, *Loc. Cit*

Artinya: “dari ibnu abbas , ia berkata:”tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang cerdas”

Menurut imam syafi'i yang dimaksud dengan cerdas itu adalah adil, berbeda dengan abu hanifah ia tidak mensyaratkan seorang wali itu adil, karena beliau berpendapat bahwa hadist ibnu abbas adalah hadist dha'if lagi “*Mudhtarab*”

f. Merdeka

Maka seorang buadak tidak sah bila menikahkan anaknya atau anggota familinya, meskipun beragama islam, berakal, baligh. Bagi fuqaha yang memegang adanya wali, maka macam-macam wali itu ada tiga, yaitu : wali nasab, (keturunan), wali penguasa dan wali bekas tuan yang jauh dan yang dekat³².

Hanya karena Islam semata-mata, bagi Imam Malik sudah mencukupi kebolehan, keharusan akan adanya perwalian atas wanita biasa, mengenai orang yang diwasiti . (Al-washi) maka para fuqaha' masih berselisih pendapat. Imam malik berpendapat bahwa washi dapat menjadi wali, tetapi imam syafi'i melarangnya³³.

Silang pendapat disebabkan, apakah kedudukan sebagai wali dapat digantikan atau tidak, bertolak dari persoalan ini pula fuqaha berselisih pendapat tentang perwakilan (mewakikan) dalam nikah, tetapi jumhur fuqaha-kecuali Abu Tsaur- berpendapat tentang bolehnya perwakilan tersebut.

Pada dasarnya tidak ada perbedaaan antara perwakilan dengan perwasiatan. Karena washi adalah wakil seseorang sesudah meninggalnya orang itu, sedang perwakilan adalah wakil juga, hanya saja terputus dengan meninggalnya.

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang; CV. Asy Syifa, 1990), Cet. ke-1, h. 374

³³ *Ibid*, h. 375

Wali nikah ada empat macam, yaitu wali nasab, wali hakim (sultan), wali hakim, dan wali maula³⁴.

a. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan, tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqih. Imam malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas *ashabah* kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah samapi keatas, kemudian saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian sudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, lalu kakak dari pihak ayah, samapi keatas.

Dalam kitab Al-Mugni terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama dari saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara laki-laki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (al maula).

Imam Syafi'i berpegang pada "*Ashabah*" yakni bahwa anak laki-laki termasuk "*ashabah*" seorang wanita, Sedangkan Imam Malik tidak menggap "*ashabah*" pada anak,

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutan diatas yang termasuk wali aqrab adalah wali nomor urut pertama, sedangkan wali nomor urut kedua menjadi wali ab'ad, jika wali pertama tidak ada, maka urutan wali yang kedua menjadi wali aqrab, dan nomor tiga menjadi wali ab'ad dan seterusnya.

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut³⁵ :

³⁴ Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2009), h. 95-100

³⁵ *Ibid*, h. 101

1. Apabila wali aqrabnya non muslim
2. Apabila wali aqrabnya fasiq
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa
4. Apabila wali aqrabnya gila
5. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadhi. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah, pemerintah, khalifah, penguasa atau qadhi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang yang diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan³⁶.

1. Tidak ada wali nasab;
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad;
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh $\pm 92,5$ km atau 2 hari perjalanan.
4. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui.
5. Wali aqrabnya *adlal*
6. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
7. Wali aqrabnya sedang ihram
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah
9. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim yang tidak bewarhak menikahkan :

³⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: tp, 1996), Cet ke 3, h. 75

1. Wanita yang belum baligh
2. Kedua belah pihak (wanita dan pria) tidak sekufu.
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah
4. Wanita yang berada diluar kekuasaannya.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri, adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah : calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat” saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan mahar da putusan bapak/saudara say terima dengan senang” setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama , kemudian calon hakim itu menjawab,” saya terima tahkim ini”. Wali tahkim terjadi apabila :

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab ghaib, atau berpergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ
3. Tidak ada qadhi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk, NTR

d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bila mana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.

Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Qais binti Qaridh, ia berkata kepada kepada Abdurrahman bin Auf, *“lebih dari seorang yang meminag saya, oleh karena itu nikahilah saya dengan dengan salah seorang yang engkau sukai.* Kemudian abdurrahman bertanya : *apakah juga berlaku bagi diri saya ?* ia menjawab *“ya’ lalu kata abdurrahman, “lalu kalau begitu aku nikahkan diri saya dengan kamu.”*

Malik berkata, andaikata seorang janda berkata kepada walinya, “ nikahilah aku dengan laki-laki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan dengan dirinya, atau laki-laki lai dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sahlah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya.”pendapat senada juga disebutkan oleh Hanafi, Laits, Al-Tsauri, dan Auza’i.

Adapun Imam Syafi’i berkata.”orang yang menikahkannya haruslah hakim atau walinya yang lain,baik setingkat dengan dia atau lebih jauh, sebab wali termasuk syarat pernikahan, jadi pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.

Ibnu Hazzam tidak sependapat dengan Imam Syafi’i dan Abu Daud, ia mengatakan bahwa kalau masalah ini dikhiaskan dengan seorang penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat yang tidak benar, sebab jika seorang dikuasakan untuk menjual suatu barang lalu membelinnya sendiri, asal ia tidak melalikan maka hukumnya boleh.

Demikan tindakan Rasulullah, beliau menikahkan budaknya dengan dirinya sendiri, sedangkan beliau merupakan sumber hukum bagi yang lain. Selain itu, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 32³⁷ :



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

³⁷ Departemen Agama RI, *Op, Cit*, h. 392

hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Dengan demikian, Allah tidak melarang, mereka yang menikahkan budak, perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela diantara keduanya.

Dari beberapa pengertian tentang wali dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan diberi kepercayaan untuk mengurus sesuatu yang berada dibawah perwaliannya, dan mempunyai kemampuan untuk melakukan itu tanpa ada intervertasi dari pihak lain.

BAB IV

PERWALIAN WANITA DALAM PERKAWINAN

MENURUT MAZHAB HANAFI

A. Kedudukan Wanita Sebagai Wali Menurut Mazhab Hanafi

Wali dalam anggota keluarga disebut wali nasab, wali nasab dapat dibedakan antara mereka yang dapat memaksakan nikah, mereka disebut wali mujbir, dan yang lainnya hanya disebut wali nasab¹. Sesungguhnya kedua jenis wali ini adalah wali nasab, akan tetapi bagi wali yang dapat memaksakan nikah adalah wali mujbir, sedangkan yang tidak dapat memaksakan nikah adalah wali nasab².

Imam Abu Hanifah membagi perwalian kepada tiga bagian.

- *Pertama* wali atas jiwa (*Wialayah 'ala al-Nafs*) yang wilayahnya meliputi kepada urusan-urusan kepribadian seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya, dan menjadikan kekuasaan ini milik bapak dan kakek.
- *Kedua* kekuasaan atas harta (*Wialayah Ala al-Mal*) yang kekuasaannya mengenai masalah harta benda seperti mengembangkan harta, menjaga serta memelanjakan. kekuasaan ini juga milik bapak dan kakek, atau orang yang memberi wasiat oleh mereka berdua,
- *Ketiga* wilayah atas jiwa dan harta secara bersamaan, dan dalam hal ini pun berkuasa tetap bapak dan kakek³.

Menurut Abu Hanifah, nikah (Perkawinan) itu tidak merupakan syarat harus pakai wali, Abu Hanifah dan beberapa penganutnya bahwa akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak,

¹ Hj Mulati, *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta; UPT. Penerbitan Universitas Tarumanegara, 2005), h. 18

² *Ibid*, h. 18

³ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, (Bairut : Dar al-Fikr, Jilid VII), h. 187

demikian juga menurut Abu Yusuf, Imam Malik dan riwayat Ibnu Qasim, beliau mengemukakan pendapatnya berdasarkan analisis dari Al-Qur'an dan Hadist Rasul⁴.

Menurut Mazhab Hanafi mereka berpendapat bahwa wali yang paling dekat yang tidak ada ditempat, maka perwalian itu diserahkan kepada wali yang lebih jauh. Dan jika wali yang paling dekat itu meninggal dunia atau tidak waras, maka menurut kesepakatan, pernikahan diserahkan kepada wali yang lebih jauh setelahnya. Mereka membedakan antara keduanya adalah, karena kematian dan gila itu menggugurkan kedudukannya sebagai wali, sedangkan ketidakhadiran di tempat tidak menggugurkan perwaliannya, melainkan ia hanya sebatas tidak dapat menikahkan saja⁵.

Tetapi jika seorang wanita mempunyai beberapa wali yang sederajat, misalnya saudara kandung, atau putera saudara kandung, atau paman atau putera paman, lalu mereka berbeda pendapat tentang siapa yang seharusnya menjadi wali baginya, maka jika ia mengizinkan kepada salah seorang dari mereka, maka orang itulah yang menjadi wali baginya. Dan ia tidak menentukan seseorang dari mereka dan kemudian mereka pun berselisih, maka diadakan undian diantara mereka. Jika ada salah seorang dari wali yang segera menikahnya dengan laki-laki yang *se-kufu* dengan persetujuannya tanpa mendapatkan izin dari wali yang lain maka nikah tersebut tetap sah. Dan jika seorang wali yang paling dekat menikahkan dengan laki-laki yang tidak *se-kufu*, maka para wali yang lain berhak menolak pernikahan itu⁶.

Dalam kitab Al-Mabsuth dijelaskan, menurut Abu Hanifah perkawinan tanpa wali (perempuan menikahkan dirinya sendiri), atau wanita menikahkan wanita lain adalah

⁴ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Ed ke- 2 1996), h. 218

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit*, h. 82

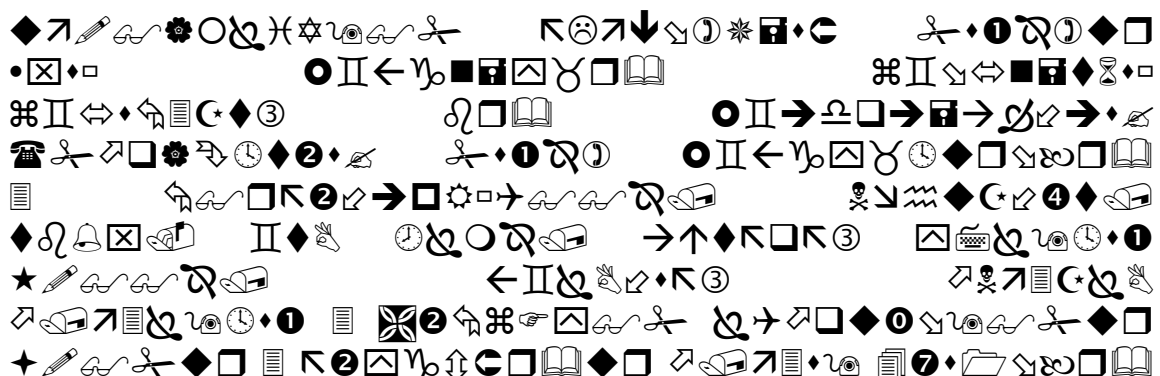
⁶ *Ibid*, h. 83

berbuat sesuka hatinya, tidak ada yang berhak menghalangi , kecuali jika mereka berbuat mungkar, maka ketika mereka berbuat mungkar , wajib dicegah, karena ini merupakan hak secara umum bagi mukallaf untuk mencegah perbuatan mungkar tersebut⁸.

Menurut Abu Hanifah ayat tersebut diatas memberikan penjelasan, bahwa seorang wanita boleh berbuat sesuatu terhadap dirinya sendiri untuk kebaikan, dalam arti kata ia boleh berbuat sesuatu terhadap dirinya sendiri untuk kebaikan, dalam arti kata ia boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa izin wali, apabial ia kawin dengan laki-laki *sekufu* (sepadan atau serasi).

Yang dimaksud “berbuat terhadap dirinya” dalam ayat diatas adalah “melakukan akad nikah” sebagaimana riwayat Imam Bukhari :”bahwa ada seorang gadis datang kepada Nabi SAW lalu berkata : Ayah ku telah menikahkan ku dengan anak saudaranya untuk menutupi rasa malunya , kemudian Nabi menyerahkan persoalannay itu kepada gadis itu sendiri. Lalu gadis itu berkata : Saya sebenarnya sudah mau menerima apa yang telah ayahku lakukan kepadaku, tetapi aku ingin memberitahukan kepada orang-orang perempuan, bahwa ayah-ayah itu tidak ada hak sedikitpun dalam hal ini⁹.

Serta surat Al-Baqarah ayat 232, sebagai berikut :



⁸ Ahmad Musthofa Al Maragi, Tafsir Al Maraghi (Semarang : CV, Toha PUTRA, 1993), h. 350

⁹ Muamahal Hamidy, *Perkawinan Dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1991), h. 30-31



Artinya: *"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah :232)"*¹⁰

Bahwa dalam ayat ini disandarkan kepada wanita (hunna), yang berarti akad tersebut terjadi hak dan kekuasaan mereka Sesuai dengan awal ayat diatas. Penunjukan ayat ini adalah masa iddah mantan istrinya sudah habis, mantan suami tidak berhak mencegah mantan istrinya menikah dengan pria lain¹¹. oleh karena itu ayat ini tidak berhubungan dengan wali, sebab yang dilarang mempersulit adalah pihak suami-suami. Ayat ini juga menjelaskan tentang larangan untuk menghalang-halangi bagi seorang wanita atau pihak istri untuk menikah, karena seorang wali juga harus memberikan kebebasan kepada orang yang berada dibawah perwaliannya.

Adapun dalil sunnah untuk mendukung kebolehan wanita menikah tanpa wali adalah hadist yang berbunyi :

جابر ابن

هأ وأذنه صماته¹²

عليه الايم بنفسها وليها

Artinya : *Diriwayatkan oleh Malik dari Abdullah Ibn Fahl Dari Nafi Ibn Jabir Ibn Muth'am dari Abdullah Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW Bersabda : "Seorang Al Ayyimn Lebih berhak Kepada dirinya daripada Walinya , dan Anak gadis itu harus diminta izinnya dan izinya adalah diamnya"* (H.R.Muslim)

¹⁰ Departen agama RI, Op, Cit, h. 46

¹¹ As Saraksi, Op. Cit, h 11-12

¹² Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Kitab Nikah, Hadits no 2545 dan 2546

Penyebutan *Al Ayyim* dalam Hadist ini, adalah wanita yang tidak mempunyai suami baik gadis maupun janda. Seperti yang diriwayatkan oleh ibn Abbas :

عليه ليس الثيب ليس

Artinya :”*Diriwayatkan oleh ibn Abbas dari Nabi SAW, ia berkata : tidak ada wali bagi seorang janda dan tidak pula “amir”*

Ditambah kasus ketiga, bahwa Al Kansa yang dinikahkan secara paksa oleh bapaknya dan ternyata tidak diakui Nabi. Ditambahkan lagi dengan keterangan Al-Kansa, bahwa Nabi saat itu tidak menanyakan tentang status dirinya, apakah gadis atau janda¹³.

Kasus lain adalah pernikahan Rasulullah dengan Ummu Salmah, yaitu ketika beliau mengutus seorang sebagai perantaranya untuk meminangnya secara langsung , Ummu Salmah berkata :”*Tidak terdapat seorang pun diantara wali saya yang hadir, lalu Rasulullah berkata “ Tidak ada seorangpun diantara walimu yang tidak menyukai, baik hadir maupun tidak hadir”*¹⁴

Hal ini menunjukkan tidak ada seorangpun dari wali Ummu Salmah yang maghadiri dari berlangsungnya akad nikah sebagaimana yang diucapkannya.

Dengan demikian hadits ini telah menunjukkan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk menyanggah dengan mengungkapkan ketidaksukaannya yang tidak pada tempatnya. Hal ini telah jelas bahwa sanggahan wali tidak dihiraukan jika memang pernikahan itu sudah *kufu*, lebih-lebih lagi dalam masalah akad tidak bergantung pada pelaksanaannya dari wali.

¹³ Lihat, Al-Bukhari, Al-Jami’us Shahih, (Mesir, Al Halaby,t.t), disebutkan dalam hadist Bukhari, pembahasan nikah, hadist no.3216

¹⁴ Mahmut syaithut, *Fiqih Tujuh Mazhab*,(Bandung : CV, Pustaka Setia, 2000), Cet ke 1, h, 124

Adapun riwayat tambahan ucapan Ummu Salmah kepada anaknya “*wahai Umar bangunlah dan nikahkan aku dengan Rasulullah* atau sabda Rasulullah kepada Umar “*Bangunlah nak lalu nikahkan ibumu*”¹⁵

Dasar Al-Qur'an yang disebutkan diatas, Hadits-Hadits Nabi SAW diatas ditambah dengan tindakan (Atsar) Umar, Ali dan Abdullah ibn Umar yang membolehkan nikah tanpa wali, serta tindakan Aisyah yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Hafsa binti Abd Ar-Rahman. Menurut pendapat as-Sarakhsi sah hukum pernikahannya¹⁶. Dengan demikian Ali membolehkan pernikahan anak perempuan disamping dalil bolehnya nikah tanpa wali. Serta menjadi dasar bolehnya seorang wanita menikahkan dirinya sendiri.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa wali itu tidak disyaratkan sama sekali, dan boleh saja wanita mengawinkan dirinya sendiri meskipun tanpa izin walinya, apabila ia kawin dengan laki-laki sekufu (sepadan), Abu Hanifah mengkhayaskan dengan jual beli.

Sedangkan wali dalam pernikahan adalah sebagai pengakuan pihak keluarga terhadap perkawinan ini, juga untuk menambah penegasan bahwa hubungan perkawinan bukan hanya sebatas hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga merupakan jalinan hubungan kokoh antara dua keluarga.

Pendapat ulama yang menyatakan tentang kebolehan atau sah pernikahan tanpa wali adalah pendapat yang memberikan kebebasan kepada wanita dalam memilih pasangan hidupnya, hal ini berlaku bagi pasangan hidupnya baik bagi wanita dewasa, baligh, sedangkan peran wali disini hanya memberi izin atau memberi restu, sedangkan hadits yang menyebutkan tidak sah pernikahan tanpa wali maksudnya adalah bukan meniadakan tetapi artinya tidak ada kesempurnaan tanpa wali.

¹⁵ *Ibid*, h. 125

¹⁶ *Ibid*, h. 12

B. Dalil pemikiran Mazhab Hanafi dalam hal Perwalian

Dalam konsep pernikahan wali adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, ia merupakan salah satu syarat harus dipenuhi, sebagaimana dijelaskan dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

أبو كريب . عن الزهري .
عليه : عليه :

17

Artinya : ”Kami dikhabarkan oleh Abu Khuraib, kami di khabarkan kan oleh Abdullah bin Mubarak yang di ambil dari Hajjat, di ambil dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah dan diambil dari Nabi SAW : Dan Di Ambil Dari Ikrimah Dari Ibnu Abbas Berkata Keduanya : Rasulullah Bersabda : Tidak Sah Nikah Kecuali Dengan Keberadaan Wali”. (H.R Ibnu Majah).

Ulama’ fiqh memandang hadist ini sebagai bukti/dasar disyaratkannya wali bagi wanita dalam pernikahan atau diperbolehkannya wanita menikah tanpa wali.

Dalam konsep perwalian yang berhak menjadi wali pada dasarnya mengikuti konsep ashabah dalam konsep ashabah orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki, mulai dari ayah, kakek saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung (adik ayah), paman tunggal ayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman ayah dan yang terakhir adalah hakim, apabila tidak dijumpai orang-orang tersebut di atas.

Dalam menetapkan ketidakbolehan wanita menjadi wali terhadap dirinya sendiri adalah, firman Allah dalam Al-Qur’an surat Annisa’ ayat 34 :



¹⁷ Abi Abdillah Ibn Yazid Al Kazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Darul Fiqri, tth.), Jilid ke-3, h. 590

Artinya : “*Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan*”. (Q.S Annisa’ 34)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa laki laki adalah pemimpin bagi wanita,dan ayat ini tidak ada menjelaskan tentang wali dalam pernikahan.

Untuk lebih memperjelas bagaimana pemikiran serta metode istimbath hukum Abu Hanifah dalam menetapkan hukum Abu Hanifah mengambil dari beberapa sumber hukum :

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan pilar utama, syari’at, semua hukum kembali kepadanya dan sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud Al-Qur’an adalah “lafas yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW yang mengandung ijaz dengan satu surat darinya dan mempunyai nilai ibadah jika membacanya¹⁸.

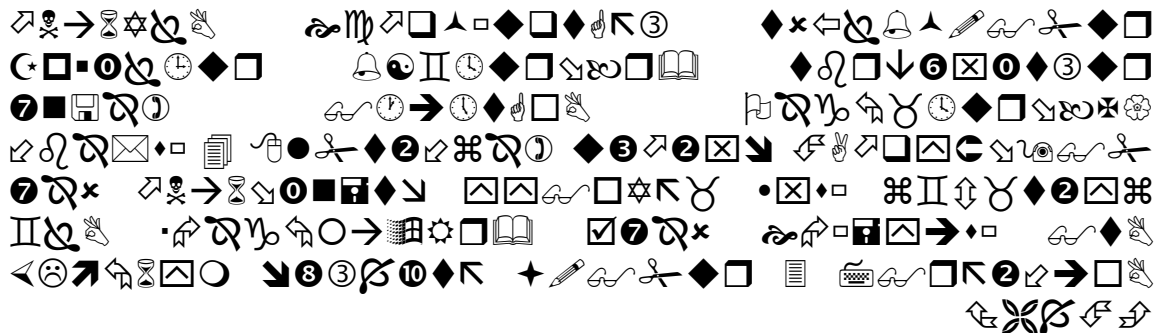
Dalam menetapkan hukum Abu Hanifah memposisikan Al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama sebagai rujukan. Abu Hanifah berpendapat bahwa As-sunnah menjelaskan Al-Qur’an jika Al-Qur’an memerlukan penjelasan, maka bayan Al-Qur’an menurut Abu Hanifah terbagai tiga¹⁹ :

1. Bayan taqirir
2. Bayan tafsir seperti menerangkan mujmal atau Musytaak Al-Qur’an
3. Bayan tabdil yakni al-Qur’an boleh di nashkan dengan Al-Qur’an tetapi Al-Qur’an di nashkan dengan Sunnah adalah jika sunnah itu sunnah mutawattir atau masyhur dan mustafidlah.

¹⁸ Muhammad Hasby ash shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982) ,h. 86

¹⁹ Hasby Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang,tth). h .142

Pemikiran Abu Hanifah dalam perwalian wanita dalam pernikahan merujuk kepada keumuman Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 240, menurut Abu Hanifah wanita boleh menikahkan dirinya sendiri :



Artinya:”Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Al-Baqarah 240)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang wanita boleh berbuat sesuatu terhadap dirinya sendiri untuk kebbaikannya, dalam arti kata ia boleh berbuat sesuatu terhadap dirinya sendiri untuk kebbaikannya, dalam arti kata ia boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa izin wali, apabila ia kawin dengan laki-laki *sekufu* (sepadan atau serasi).

b. As-Sunnah

Dasar yang kedua yang abu Hanifah gunakan adalah As-Sunnah, ulama Hanafiah menetapkan bahwasanya yang ditetapkan dengan Al-Qur'an yang qadhi dalalahnya dinamakan fardhu, sesuatu yang ditetapkan oleh as-sunnah yang dhanny dhalalahnya dinamakan wajib, demikian halnya tiap yang dilarang oleh Al-Qur'an haram dan yang dilarang oleh As-Sunnah Makruh Tahrim.

Dalam permasalahan wali nikah, Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh menjadi wali terhadap dirinya sendiri, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah :

جبرابن

نفها واذنها صماتها²⁰

وليها

بنفسها

الايم

عليه

Artinya: “ *Diriwayatkan oleh Malik dari Abdullah Ibn Fahl Dari Nafi Ibn Jabir Ibn Muth’am dari Abdullah Ibn Abbas, bahwa Rasulullah Saw Bersabda :” Seorang Al Ayyimn Lebih berhak Kepada dirinya daripada Walinya , dan Anak gadis itu harus diminta izinnya dan izinya adalah diamnya*” (H.R.Muslim)

c. Qiyas

Imam Abu Hanifah mengemukakan, jika tidak ditemukan nash dari ketiga sumber diatas, maka beliau menggunakan jalur qiyas, yang dimaksud dengan qiyas adalah penyetaraan hukum yang tidak ada masalah dengan masalah lain yang ada nashnya dengan syarat bahwa terdapat persamaan *illat*²¹, diantara kedua masalah itu.

Dalam masalah wali dalam pernikahan Abu Hanifah menggunakan dalil Al-Qur’an dengan mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli, sesungguhnya wanita itu mempunyai kemandirian dalam melakukannya.

C. Tinjauan Pemikiran Mazhab Hanafi Menurut Hukum Islam

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya, jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal, demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh²².

Mayoritas ulama shalaf maupun khalaf antara lain Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Abu Hurairah, Aisyah, Malik, Syafi’i, Ahmad, Ishak, Abu Ubaid, Ats-Tsauri, dan penganut

²⁰ Muslim, *Shahih Muslim, Op, Cit*, Hadits no 2545 dan 2546

²¹ *Illat* adalah sifat yang menggabungkan antara perkara yang sudah jelas hukumnya terhadap sesuatu yang belum jelas hukumnya.

²² Abdul Qhafur, *Op, Cit* h 77-78

Imam Syafi'i berkata: "Tidak ada hak untuk menjadi wali bagi seseorang selama ada bapak si wanita, apabila bapaknya sudah meninggal dunia, maka yang menggantikan posisinya adalah kakek, kalau tidak ada kakek maka digantikan oleh buyutnya, karena semuanya adalah bapak. Sebab yang paling berhak menikahkan wanita adalah dari jalur bapak, bukan dari jalur persaudaraan, berbeda halnya dengan masalah waris

Sedangkan Mazhab Zhahiriyah menyebutkan “hal ini boleh dilakukan bagi seorang janda, tetapi tidak boleh dilakukan bagi seorang gadis”.

7 ■ ~~Hand~~ ♦ ↖



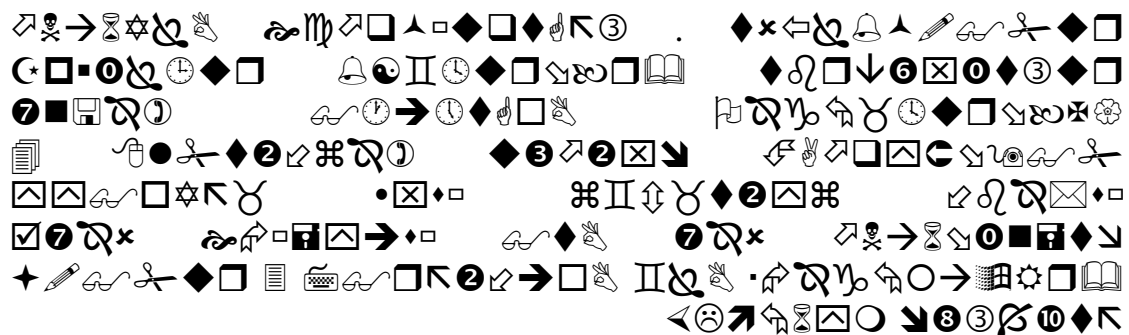
Dalam ayat menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan sebagaimana surat An-Nisa' ayat 34 tersebut , mereka menisbahkannya dengan perwalian perempuan, oleh karena itu wali perempuan tidak dibolehkan dalam pernikahan.

Dengan demikian pentingnya wali dalam pernikahan agar wanita tidak mengurus sendiri hal-hal yang bisa mengurangi perasan malu dan murah nya (harga dirinya) Syeikh Waliyullah Ad-Dahlawi berkata: "Disyaratkan wali dalam pernikahan agar wanita

terpelihara harga dirinya, karena bila waniat mengurus sendiri pernikahannya, maka hal itu dapat menampakkan ketidak tahu maluannya serta kebodohnya. Sepatutnya dibedakan antara pernikahan dan penzina, keduanya dibedakan dengan adanya pengumuman atau pemberitahuan. Dan kehadiran wali merupakan bentuk paling representatif dan utama dalam persoalan ini²³.

Berbeda halnya dengan Mazhab Hanafi membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri atau wanita nikah tanpa wali, dalam hal ini mereka menggunakan dalil dengan mengkhayaskan akad nikah kepada akad jual beli, sesungguhnya wanita mempunyai kemandirian dalam melakukannya.

Dalam hal ini Abu Hanifah mengambil dalil dari Al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 240 :



Artinya : *“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (al-Baqarah : 240)

Menurut Abu Hanifah ayat diatas memberikan sebuah kedudukan bahwa seorang wanita boleh berbuat sesuatu terhadap dirinya sendiri untuk kebbaikannya, sebgaimana ia boleh melakukan berbagai hal seperti : akad jual beli, ijarah (sewa-menyewa), rahn (gadai) dan sebagainya, yang memang tidak ada bedanya dengan akad nikah, dalam arti

²³ Isham bin Muhammad asy-Syarif, *Op, Cit*, h. 340

kata ia boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa izin wali apabila dia menikah dengan laki-laki yang sekufu dengannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan wali ini, wanita tidak saja dijadikan objek hukum sebagaimana kebanyakan ulama dalam memahami ayat-ayat tentang wanita pada umumnya mendiskriminasikan wanita.

Namun padahal lebih dari itu wanita pun bisa menjadi subyek hukum dalam segala bidang dengan memandang situasi dan kondisi dengan tidak mengabaikan norma-norma agama.

Pendapat-pendapat yang mengharuskan wanita harus mendapat hak ijbar (pemaksaan) wali merupakan pandangan para pakar fiqih yang memahami makna suatu teks (Nash Al-Qur'an dan Hadits) bahwa para wali berhak memaksakan kehendaknya hal ini seakan-akan mendiskriminasikan wanita dalam memilih calon suaminya.

Sedangkankan Abu Hanifah berpendapat hak ijbar hanya berlaku bagi wanita yang masih anak-anak dalam melakukan pernikahan yang mana Abu Hanifah dalam memahami suatu masalah tidak hanya dengan Nash saja, tetapi juga melalui ijtihad dengan menggunakan rasio.

D. Analisa

Adanya konsep khiyar dalam perkawinan dan diberikan kepada wanita yang dinikahkan sebelum baligh adalah, menunjukkan pemberian kebebasan yang setengah-setengah kepada wanita(tidak secara penuh) untuk memilih pasangannya. Praktek yang digunakan wali dalam menikahkan anaknya sering disalah gunakan untuk memenuhi kepentingan wali, mungkin untuk tujuan mendapatkan harta, kedudukan serta tujuan lainnya, sementara perempuan didorong untuk tidak menggunakan hak pilihnya untuk menimbulkan kecintaannya kepada pasangan yang sudah menjadi pilihan dan sudah dikenalnya, perbuatan ini menunjukkan perlakuan wali kepada perempuan semena-mena.

Pentingnya wali dalam pernikahan, menurut Imam Malik dan Syafi'i adalah tentang larangan bagi wali atau bekas suami menghalang-halangi wanita yang berada dibawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki idamannya bertujuan untuk menunjukkan berapa pentingnya wali dalam pernikahan.

Lain halnya dengan Abu Hanifah, beliau berpendapat wanita boleh menikahkannya sendiri tanpa wali, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 240, ayat ini menunjukkan wanita bebas melakukan apa saja terhadap dirinya sendiri untuk kebbaikannya dalam artikata ia boleh menikahkannya sendiri, tanpa izin wali asalkan laki-laki yang menikah dengannya sekuflu (sepadan).

Dalam menuentukan persyaratan perwalian laki-laki, imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal mengambil penjelasan dari ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 tentang laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Padahal ayat ini menjelaskan tentang kepemimpinan laki-laki dirumah tangga.

Dalam proses perjanjian perkawinan, aliran Hanafiyah mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan dalam kecakapan bertindak hukum. Adanya perempuan yang telah dewasa dan cerdas, dianggap mampu bertindak hukum tanpa menunggu bantuan dari walinya. Pihak mempelai laki-laki dan perempuan mempunyai posisi sama dalam suatu perjanjian perkawinan dengan laki-laki yang telah ditentukan syara'. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah yang artinya “ *dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiaban menurut cara yang ma'ruf*”.

Pemahaman tersebut didasarkan pada pendekatan rasio, bahwa seorang yang telah dewasa, mempunyai kecerdasan dan dianggap telah mampu untuk mengurusinya termasuk dalam hal perkawinan.

Dengan demikian anggapan yang menyatakan bahwa surat an-nisa' tersebut dijadikan sebagai sumber hukum bahwa seorang wali harus laki-laki itu merupakan

alasan yang tidak bisa diarahkan kepada wali, karena ayat tersebut menjelaskan tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, tidak dalam hal perwalian.

Kembali kepada kasus Aisyah yang menikahkan anak saudara perempuannya, tidak ada yang melarang dan ini berarti boleh dan tidak menyalahi, disamping itu surat An Nisa' ayat 34 bukan tentang wali, namun tentang kepemimpinan seorang laki-laki dalam keluarga, dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh ulama yang melarang wanita menjadi wali, tidak memberikan alasan yang kuat.

Pendapat Mazhab Abu Hanifah yang memberikan urutan wali wanita dan membolehkannya dalam perwalian wanita dalam pernikahan, merupakan alasan yang logis, dan mengqiyaskan kepada kebolehan wanita dalam jual beli, ini berarti wanita juga bisa bertindak hukum, memutuskan sesuatu dan dianggap cakap.

Dengan kebolehan wanita menjadi wali dalam pernikahan, akan tampak bahwa wanita tidak saja dijadikan sebagai objek dalam perwalian, namun bisa juga menjadi subjek dalam perwalian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai pemikiran abu hanifah tentang perwalian wanita dalam perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, hal ini di qhiyaskan dengan jual beli, asalkan wanita itu menikah dengan laki-laki yang sekufu.
2. Dalam masalah wali, langkah ijtihaad yang dilakukan Imam Abu Hanifah adalah Al-Qur'an, Hadits dan Qiyas
3. Dalam proses perjanjian perkawinan, aliran Hanafiyah mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan dalam kecakapan bertindak hukum. Adanya perempuan yang telah dewasa dan cerdas, dianggap mampu bertindak hukum tanpa menunggu bantuan dari walinya

B. Saran

Setelah penulis membuat beberapa kesimpulan pada skripsi ini, maka sesuai dengan kondisi dan keadaan yang memungkinkan penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam memahami persoalan-persoalan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, hendaknya diberikan pemahaman yang luas,

serta selalu memperhatikan maksud hukum yang sesungguhnya dengan memperhatikan kemaslahatan untuk menghindari kemafsadatan.

2. Dengan adanya pendapat Abu Hanifah dalam permasalahan wali ini hendaklah kita sebagai umat Islam tidak mendeskriminasikan hak-hak perempuan dalam perwalian.
3. Hendaknya dalam bertindak hukum wanita tidak saja dijadikan objek hukum tetapi lebih dari itu wanita pun bisa menjadi subjek hukum dalam segala bidang dengan memandang situasi dan kondisi dengan tidak mengabaikan norma-norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet ke 3
- Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab* (Bandung; CV. Sinar Bandung, 1992), Cet. Ke-2.
_____. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta; PT Rineka Citra, tth).
- Ash shiddieqy, Muhammad Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982).
- _____, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang,tth).
- As-Sarakshi, Syam ad-Din, *Al Mabsuth*, (Bairut; Daar al-Ma'rifah, 1989), Jilid IV.
- Asy-Syarif, Isham bin Muhammad, *Syarah Kumpulan Hadits Shahih Tentang Wanita*, (Jakarta :PT Pustaka Azzam, 2006).
- As-Sayid Salim bin Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-2.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Bairut; Dar al-Fikr, t.th), Jilid VII,
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih keluarga*, (Jakarta; Dar at-Tauji wa An-Nashr Al-Islamiyyah, 2001).
- Al-Jaziry, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala Mazaahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Daar Al-Fikr, t. Th), Juz IV.
- _____, *Kitab Fiqih Empat Mazhab*, (Lebanon : al Fikr, 1986), Juz IV
- Al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, (Bandung; Dahlan, t.th.), Jilid 3.
- Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1994), Cet Ke-3, edisi kedua.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo; PT. Qomari Prima Publisher, 2007)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1989)
- Fikri, Ali, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta; Mitra Pusta, 2003), Cet ke-1
- Ghazali, M. Bahri, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta; Pedoman Ilmu Jaya, 1992), Cet ke-2

- Hamidy, Muamahad, *Perkawinan Dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1991)
- Ibn Yazid Al-Kazwaini, Abi Abdillah, *Sunan Ibn Maja*, h Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Kitab Nikah, h, (Darul Fiqri, t.th.), Jilid 3
- Idris Marbawi, Muhammad, *Kamus Almarbawi*, (Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby,tth) ,Juz II
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2006), Cet Ke-18
- Mubayyidh, Makmun, *Saling Memahami Dalam Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2005).
- Muhammad Ismail, Sya'ban, *At Tasyri' Al Islami Wa Ath Waruh*, (Mesir; Al Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1985)
- Mubarak, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam* , (Bandung : PT Remaja Rosda Karya tth)
- Muktar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1
- Ma'luf Masu'i, Luwis, *Kamus Murjit*, (Beirut; ttp, 1946), h. 919
- Mulati, Hj, *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta; UPT. Penerbitan Universitas Tarumanegara, 2005
- Nawawi, Imam, *Shohih Muslim*, (Lebanon; Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1971), Jilid IV
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algersindo, 2006), Cet. Ke-3.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta: tp, 1996).
- Roestan dkk, *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum dan Syari'at Islam*, (Jakarta; CV. Kalam Mulia, 1992), Cet. Ke-1.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang; CV. Asy Syifa, 1990), Cet. ke-1.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta; Pena Pundi Aksara, t.th)
- Sahrani, Sohari, *Fiqih Munakahat,Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawali pers ,2009), Ed 1.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2009).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor; Kencana, 2003)
- Syaithut, Mahmut, *Fiqih Tujuh Mazhab*,(Bandung : CV, Pustaka Setia, 2000), Cet ke 1.

S, Praja Juhaya, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. Ke-3.

Tihami, prof, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2009)

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta :PT Hidakarya Agung, 1990), Cet Ke-12

Zuhri, Muh, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997),
Cet ke 2